



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
(BASARNAS), DAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 18
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 15 Juli 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.55 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2019
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos., M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Fisik 31 Orang dan Virtual 14 Orang (45 Orang) dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2019.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meraih predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada Hapsem I dan II BPK tahun 2019. Selanjutnya, terkait dengan predikat opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) untuk Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI meminta untuk dapat meningkatkan pengelolaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga meraih predikat opini WTP.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah konkret agar temuan-temuan dalam Hapsem I dan II BPK Tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun mendatang, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen keuangan dan aset melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara lebih ketat dan detail untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif dalam pemanfaatan keuangan negara.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.55 WIB.

Jakarta, 15 Juli 2020

KETUA RAPAT,



LASARUS

MENTERI DESA, PDT, DAN  
TRANSMIGRASI



ABDUL HALIM ISKANDAR

MENTERI PERHUBUNGAN,



BUDI KARYA SUMADI

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO